

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat dan sebagai lembaga yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan terlebih bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha tersebut membutuhkan dana dalam upaya membiayai kegiatan usahanya. Dalam hal ini lembaga perbankan berperan penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pemodalan bagi para pelaku usaha tersebut. Kemudahan dalam penyediaan dana untuk para pelaku usaha tersebut dapat diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Oleh karena itu, perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang penting dalam kehidupan perekonomian.

Peran industri perbankan dalam rangka menunjang perekonomian dapat dilakukan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sumber perolehan dana bank berasal dari simpanan atau tabungan masyarakat yang dimasukan dalam bank berupa giro, deposito, tabungan dan sebagainya yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana terutama pada dunia usaha dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada nasabahnya.

Dengan adanya kredit maka memberikan pendapatan bagi bank. Kredit adalah sumber pendapatan terbesar bank dan merupakan kegiatan yang memiliki nilai aset terbesar dibandingkan dengan operasional bank yang lain. Peningkatan pemberian kredit oleh bank akan dapat meningkatkan pendapatan, yaitu berupa bunga bank atas kredit yang diberikan. Namun disamping itu peningkatan pemberian kredit juga akan di ikuti oleh tingginya tingkat resiko bagi bank. Resiko tersebut adalah tidak tertagihnya kredit nasabah. Tidak tertagihnya kredit ini akan menjadi sebuah ancaman jika pihak perbankan tidak segera mengambil langkah penyelesaian. Dalam usaha pencegahan tidak tertagihnya kredit, salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen bank yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya khususnya pada persetujuan pemberian kredit.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah di suatu bank, sistem pengendalian intern harus dilaksanakana dengan sebaik-baiknya. Karena sistem pengendalian intern yang baik ini akan sangat membantu organisasi dalam menghindari adanya *fraud* atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah serta bank (organisasi) itu sendiri.

Pengendalian intern kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Tujuan utama dari pengendalian intern kredit suatu bank adalah untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak, melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah, mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau

masih perlu disempurnakan, memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali, mengetahui posisi presentase yang dilakukan bank dan meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan.

Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut. Pengendalian intern yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan terjadinya penyelewangan, pemborosan, kredit macet serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut terhindar dari kesalahan-kesalahan atau penyelewengan.

Pelaksanaan pengendalian internal kredit di perbankan adalah dengan adanya struktur organisasi yang memadai yaitu dengan adanya pembagian tugas yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan, seperti adanya pemimpin manajer, supervisor manajer dan lain-lain, perhatian dan arah manajemen bank dengan menjadi *coach* yang baik dan memberikan motivasi kepada karyawan serta komite lainya seperti komite manajemen resiko. Pengendalian internal kredit di perbankan juga dapat dilakukan dengan menerapkan analisis 7P yaitu analisis untuk menilai nasabah dari segi kepribadiannya di masa lalu (*personality*), mengklasifikasikan nasabah (*Party*), mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit (*Purpose*), menilai usaha nasabah di masa yang akan datang (*Prospect*), cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil

(*payment*), menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba (*Profitability*) serta menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan (*Protection*). Selain itu pengendalian internal kredit di perbankan dapat dilakukan melalui analisis 5C yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui watak atau sifat calon nasabah (*Character*), mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit (*Capacity*), kondisi kekayaan yang dimiliki calon debitur (*Capital*), penilaian jaminan yang diberikan calon debitur (*Collateral*), menilai kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang (*Condition*).

Efektivitas pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* menyangkut keuntungan dari bunga kredit, sedangkan *Safety* menyangkut kelancaran dari pengembalian kredit. Apabila memiliki keuntungan dari bunga kredit dan debitur teratur dalam mengembalikan kreditnya kepada bank maka dapat dikatakan pengendaliannya efektif. Disamping itu, apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam sistem pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur-unsur pengendalian internalnya. Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang dicapai.

Dengan demikian dapat dinyatakan apabila pengendalian internal sudah memadai akan meningkatkan pelaksanaan keputusan kredit yang baik. Sifat hubungan antara pengendalian internal dengan keputusan pemberian kredit adalah searah.

Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka risiko yang akan terjadi juga semakin besar. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank. Karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur, merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dananya kepada masyarakat dan dana yang diberikan adalah berupa kredit. PT BPR Perbaungan Hombar Makmur menerapkan prosedur dan kebijakan dengan baik dalam pemberian kredit, namun disisi lain terdapat masalah yang dialami PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur. Kredit bermasalah ini digolongkan menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Debitur yang tidak dapat membayar tunggakan 1-2 bulan disebut dengan dalam perhatian khusus (DPK). Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit pada bank tersebut ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban dalam melunasi kredit. Adapun debitur yang kreditnya kurang lancar, diragukan dan macet atau tidak dapat dibayar tunggakan lebih dari 90 hari disebut kredit bermasalah (*Non performing loan*), hal ini terjadi oleh dua faktor yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal non bank debitur. Faktor internal bank adalah faktor yang berasal dari bank itu sendiri biasanya seperti kegiatan ekspansi

penyaluran kredit yang besar-besaran tanpa adanya standarisasi analisis calon debitur dan pengawasan yang tidak maksimal oleh bank. Faktor eksternal adalah faktor yang bukan disebabkan oleh bank dan debitur, yaitu seperti adanya pengaruh inflasi dan kurs, persaingan usaha, kondisi usaha, dan faktor alam.

Tabel 1.1
Jumlah Pemberian Kredit Modal Kerja
PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur Tahun 2018 dan 2019

Keterangan	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Jumlah Debitur	Jumlah kredit Yang diberikan	Jumlah Debitur	Jumlah kredit Yang diberikan
Kredit Lancar	309	12.412.334.000	354	11.792.419.000
Kredit DPK	38	1.624.129.000	54	2.474.197.000
Kredit Kurang Lancar	-	-	-	-
Kredit Diragukan	2	40.165.000	1	50.600.000
Kredit Macet	18	809.335.000	19	775.113.900
Total kredit	696	14.885.963.000	428	15.092.349.900

Sumber: PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui pada Tahun 2018 total kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha sebesar Rp 14.885.963.000,- dari jumlah pemberian kredit tersebut terdapat kredit DPK (Dalam Pengawasan Khusus) sebesar Rp 1.624.129.000,- dengan Rasio sebesar 10,9% dari jumlah kredit yang diberikan dan terdapat *non performing loan* (kredit yang menunggak melebihi 90 hari) yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet sebesar Rp 849.500.000,- dengan rasio *non performing loan* sebesar 5,7%.

Sedangkan pada Tahun 2019 total kredit yang diberikan sebesar Rp 15.092.349.900,- dan jumlah kredit DPK (Dalam Pengawasan Khusus) sebesar Rp 2.475.197.000,- dengan rasio sebesar 16,4% dari jumlah kredit yang diberikan dan terdapat *non performing loan* yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet sebesar Rp 825.713.900,- dengan rasio *non performing loan* sebesar 5,4% dari jumlah kredit yang diberikan.

Dari uraian diatas dapat dilihat jumlah kredit DPK (Dalam Pengawasan Khusus) mengalami kenaikan sebesar dari 10,9% menjadi 16,4% dari kredit yang diberikan dan *non performing loan* pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar dari 5,7% menjadi 5,4 % dari jumlah kredit yang diberikan. Tetapi apabila dilihat dari nominalnya, kredit bermasalah (*non performing loan*) mengalami penurunan sebesar Rp 23.786.100. yaitu dari Rp 849.500.000 (2018) menjadi Rp 825.713.900 (2019).

PT BPR Perbaungan Hombar Makmur tergolong tidak wajar, hal ini didukung oleh:

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit.”¹

Dari hal tersebut dapat kita lihat adanya penyimpangan prosedur dan kebijakan dalam memberikan kredit dimana pihak bank mungkin tidak memperhatikan kelayakan dari kredit yang diajukan oleh para nasabah dan

¹Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/2/PBI/2013 **Tentang Penetapan Status dan Tindakan Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional,**

petugas kredit sehingga kredit cukup mudah dicairkan. Salah satu cara untuk menghindari kredit DPK dan kredit bermasalah (*Non performing loan*) yang dilakukan debitur adalah dengan melakukan pengendalian intern pemberian kredit yang efektif, seperti adanya sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang terkait, adanya kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi, adanya pejabat yang kompeten yang akan memproses kredit, adanya fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan dan membuat judul **“Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT BPR Perbaungan Hombar Makmur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan suatu perusahaan mengharuskan manajemen mampu mengawasi jalannya operasi secara efektif. Permasalahan merupakan faktor yang menghambat kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Moh. Nazir:

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan

rintangan, adanya celah (*gap*), baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada²

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah **Apakah Efektivitas Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan Pengendalian Intern dalam pemberian kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi penulis adalah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah khususnya mengenai penerapan pengendalian intern pemberian kredit di bank
2. Bagi perusahaan adalah untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan tentang penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dalam meningkatkan kualitas kredit dan penagihan sehingga dapat dihasilkan kredit yang berkualitas.

²Moh. Nazir, **Metodologi Penelitian**, cetakan ketujuh: Ghalia indonesia, Bogor, 2014, hal. 96

3. Bagi penelitian selanjutnya adalah untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin meneliti terhadap permasalahan yang sejenis pada masa mendatang.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pemberian Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Dalam meningkatkan kegiatan usahanya sehari-hari, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit, bank dituntut agar mendapatkan keuntungan yang memadai sehingga cukup untuk menutupi seluruh biaya seperti *overhead* dan biaya operasional lainnya. Pendapatan dana yang menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, namun demikian dengan resiko yang dihadapi oleh bank harus berhati-hati dalam penempatan dana dalam bentuk kredit.

Kredit asal mulanya berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Sementara itu, bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang tersebut bahwa uang yang dipinjamkan pasti dikembalikan.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu perjanjian atau suatu presentasi dari satu pihak ke pihak yang lain yang pengembalian presentasi dari satu pihak ke pihak yang lain yang pengembalian presentasi tersebut akan dilakukan pada waktu yang ditetapkan disertai dengan presentasi berupa bunga.

2.1.2 Manfaat dan Tujuan Kredit

Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuannya untuk mencapai suatu yang diinginkan terbatas. Menurut Ismail manfaat pemberian kredit sebagai berikut:

- 1. Manfaat Kredit bagi Bank**
 - a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa beberapa bunga.**
 - b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank**
 - c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa**
 - d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha**
- 2. Manfaat kredit bagi Debitur**
 - a. Meningkatkan usaha nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan**
 - b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah**
 - c. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya**
 - d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank**
 - e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.**
- 3. Manfaat kredit bagi pemerintah**
 - a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.**
 - b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendalian moneter**
 - c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat**
 - d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.**

- e. Pajak pendapatan dari bank yang memberikan kredit karena terdapat kenaikan laba yang berasal dari bunga kredit.
 - f. Pajak pendapatan dari debitur
 - g. Kredit bank dapat memperluas pasar, yaitu dengan semakin lainnya volume produksi dan konsumsi masyarakat.
4. Manfaat Kredit bagi Masyarakat Luas
- a. Mengurangi tingkat pengangguran
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independen*, dan asuransi
 - c. Penyimpan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya
 - d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan³

Menurut Thamrin dan Francis tujuan kredit antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
- b. Membantu usaha nasabah: tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usaha.
- c. Membantu pemerintah: bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.⁴

Menurut Hasibuan Tujuan Kredit antara lain:

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit,
- b. Memanfaatkan dan memproduktif dana-dana yang ada,
- c. Melaksanakan kegiatan operasi bank,
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat,
- e. Mempelancar lalu lintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan

³Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori menuju Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: Kencana, Jakarta, 2010, hal. 97

⁴Thamrin dan Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 166

g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

2.1.3 Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebutkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kasmir jenis kredit diantara lain:

- 1. Dilihat Dari Segi Kegunaan**
 - a. Kredit investasi,**
 - b. Kredit Modal Kerja, kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi**
- 2. Dilihat Dari Tujuan Kredit**
 - a. Kredit Produksi, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.**
 - b. Kredit komsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam hal kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha**
 - c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dengan tersebut.**
- 3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu**
 - a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu Tahun atau paling lama satu Tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.**
 - b. Kredit Jangka Menengah, kredit yang jangka waktu kreditnya berkisaran antara satu Tahun sampai tiga Tahun, biasanya untuk investasi.**
 - c. Kredit Jangka Panjang, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. kredit Jangka Panjang waktu pengembaliannya diatas tiga Tahun atau lima Tahun.**
- 4. Dilihat Dari Segi Jaminan**

- a. **Kredit Dengan Jaminan**, yaitu kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud
 - b. **Kredit Tanpa Jaminan**, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan kraktek serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
5. **Dilihat Dari Segi Sektor Usaha**
- a. **Kredit Pertanian**, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 - b. **Kredit Perternakan**, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya sapi atau kambing.
 - c. **Kredit Industri**, yaitu kredit membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 - d. **Kredit Pertambangan**, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau tanah.
 - e. **Kredit pendidikan**, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
 - f. **Kredit Perusahaan**, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perusahaan.⁵

Kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitasnya atau pengolongan kredit yaitu *performing loan* dan *non-performing loan* didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga.

Menurut Ismail dalam bukunya akuntansi bank, *performing loan* merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan atau

⁵Thamrin dan Francis, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 168.

terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari, *performing loan* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. **Kredit Lancar**
Kredit lancar adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok maupun bunga
- b. **Kredit dalam perhatian khusus**
Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender)

Non-performing loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Non-performing loan* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. **Kredit kurang lancar**
Kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan atau pembayaran bunga antara 91 hari sampai dengan 190 hari.
- b. **Kredit diragukan**
Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari.
- c. **Kredit macet**
Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari⁶

2.1.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan kepada nasabah. Tujuan adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan suatu permohonan kredit.

Menurut Mulyadi menyatakan definisi prosedur sebagai berikut:

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang⁷

⁶Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2009, hal. 226

⁷Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 5

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan antara bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Hal menjadi perbedaan hanya terletak dari bagaimana cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Menurut Syamsu Iskandar menyatakan defenisi prosedur sebagai berikut:

prosedur dapat diartikan sebagai proses secara berurutan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu baik dalam sistem informasi akuntansi maupun dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari⁸

Menurut Kasmir, secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama permohonan kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan permohonan kredit. Tujuan adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila

⁸Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan : Dalam Rupiah dan Valuta Asing*: In Media, 2013, hal. 8

salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

4. Wawancara I

Tahap ini merupakan penyidik kepada calon peminjam dengan cara berhadap langsung dengan calon peminjam. Tujuan adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

5. Peninjauan Ke Lokasi (*on the spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

6. Wawancara II

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara dua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

7. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilain mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya.

8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.⁹

⁹Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 106

2.1.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank dengan analisis 5C dan 7P Kasmir yaitu:

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

***Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.**

2. *Capacity*

***Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.**

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi/laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan solfabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.¹⁰

¹⁰Kasmir, **Dasar-dasar perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, hal.136-139

2.2 Efektivitas Pengendalian Internal Kredit

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Menurut Rusliaman Siahaan efektivitas merupakan: **“tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapainya melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan”**¹¹

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai hubungan arti efektivitas dibawah ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. *Outcome* pada bank berupa jumlah bunga yang diterima oleh bank dari pemberian kredit dan menjadi *output* pada bank berupa pemberian kredit terhadap nasabah. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

¹¹Rusliaman Siahaan, **Pengantar Bisnis**, Edisi Revisi, Medan, 2015, hal.113

2.2.2 Pengertian Efektivitas Pengendalian Internal Kredit

Pengendalian internal memiliki lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan. Komponen-komponen pengendalian internal ini merupakan suatu proses pencapaian yang akan dilakukan oleh pihak organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal akan mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat yang meliputi berbagai aspek mengenai peminjam, untuk memutuskan apakah layak diberikan kredit atau tidak. Selanjutnya prinsip-prinsip keputusan kredit yang sesuai akan mendukung tercapainya pelaksanaan dan penerapan prinsip 5C yang meliputi karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi, dan terwujudnya sistem pemberian kredit yang efektif.

Efektivitas pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit yaitu *Profitability* dan *Safety*. Di samping itu, apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan dalam sistem pemberian kredit pada dasarnya merupakan unsur pengendalian internalnya. Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang dicapai.

Dengan demikian dapat dinyatakan apabila pengendalian intern sudah memadai akan mengingatkan pelaksanaan keputusan kredit yang baik dan akan mengurangi terjadinya kredit yang bermasalah atau disebut juga dengan kredit macet.

2.3 Sistem Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian intern adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi untuk meningkatkan lingkungan dalam upaya mencapai tujuan dan menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah.

Menurut Mulyadi Pengendalian Intern adalah:

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.¹²

2.3.2 Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Kredit merupakan pendapatan umum dari suatu bank. Jika pemberian kredit dilakukan secara tidak hati-hati maka akan terjadi kredit macet. Kredit macet bagi suatu bank merupakan masalah yang harus dihindari, karena akan menjadi kerugian bagi suatu bank. Salah satu cara untuk menghindari kredit macet adalah dengan adanya pengendalian intern pemberian kredit pada bank tersebut.

Pengendalian intern pemberian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

¹²Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 129

Bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

2.3.3 Tujuan Pengendalian Intern Kredit

Menurut Malayu S.P. Hasibuan tujuan pengendalian internal pemberian kredit, antara lain adalah untuk:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Melakukan tindakan pencegah dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
6. Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.¹³

2.3.4 Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian internal memiliki 5 (lima) komponen pengendalian internal yang saling berkaitan. Komponen-komponen pengendalian internal ini merupakan suatu proses pencapaian yang akan dilakukan oleh pihak organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

¹³Malayu S.P Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan:** Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.105

Adapun komponen-komponen yang terkait IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) dalam Sukrisno Agoes sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan¹⁴

Penjelasan atas komponen-komponen pengendalian intern:

- 1) **Lingkungan Pengendalian**
 Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini:
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
 - d. Struktur organisasi
 - e.
 - f. Pemberian wewenang dan tanggungjawab
 - g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- 2) **Penaksiran Resiko**
 Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan *intern* maupun *ekstern* yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.
- 3) **Aktivitas Pengendalian**
 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilakukan
- 4) **Informasi dan Komunikasi**
 Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas

¹⁴Sukrisno Agoes, **Auditing**, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 100

yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

5) **Pemantauan**

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilantindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.¹⁵

2.3.5 Kriteria Efektivitas Pengendalian Internal Kredit

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas.

Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern kredit menurut Tjukria

P. Tawah adalah:

1. **Harus ada sistem pengendalian yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan transaksi angunan.**
2. **Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan: ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang : ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum); ketentuan mengenai tingkat bunga dan provinsi; ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan; informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur; konsentrasi kredit; dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.**

¹⁵Sukrisno Agoes, **Auditing**, Cetakan Kelima, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal.100

3. **Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit dikoperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta ketrampilan yang memadai dalam mengenai permasalahan dan penanganannya**
4. **Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review serta memantau tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.¹⁶**

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian intern dalam pemberian kredit adalah:

1. pemisahan fungsi antara pejabat yang terkait
2. kebijakan atau peraturan yang ketat terhadap pemberian kredit
3. pejabat yang kompeten dibidangnya.
4. review terhadap pelaksanaan kredit yang telah diberikan secara terus menerus

¹⁶Aderson Marbun, **Peranan Intern Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Koperasi Simpanan Pinjaman Artha Jaya Sentosa Jakarta)** Skripsi:Universitas Widyatama, Bandung, 2006, hal.39

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah variabel yang menjadi perhatian suatu penelitian dan yang menjadi pusat perhatian dan sasaran perhatian. Sehingga yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT BPR Perbaungan Hombar Makmur.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif Metode deskriptif adalah suatu periode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode analisis deskriptif, data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk dapat memberikan keterangan yang objektif atas masalah yang dihadapi, serta gambaran umum perusahaan

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Nanang Martono **”populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.”**¹⁷

¹⁷Nanang Martono. **Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif**, Edisi Revisi Kedua, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hal.75

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau karyawan Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur. Sehingga populasi adalah 25 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiono “**sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut**”.¹⁸

Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Burhan Bungin **teknik ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel**.¹⁹

Maka yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah karyawan atau pegawai bagian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur sebagai berikut:

1. Jenjang pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun
3. Menangani pemberian kredit modal kerja kepada debitur

Berdasarkan kriteria tersebut maka yang menjadi sampel adalah karyawan PT BPR Perbaungan Hombar Makmur bagian kredit yang berjumlah 15 orang dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Jumlah Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Administrasi Kredit	4
2	Account Officer	3

¹⁸Nanang Martono. **Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif**, Edisi Revisi Kedua, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hal.75

¹⁹Burhan Bungin, **Metode Penelitian Sosial & Ekonomi**, Edisi Pertama: prenaadmedia Grup, Jakarta, 2013, hal.118

3	Kalir Kredit	5
4	Pelayanan Nasabah	3
	Jumlah Sampel	15

Sumber: PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara langsung dari perubahan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah jumlah kredit lancar, kredit DPK, dan kredit kurang lancar, kredit macet pada Tahun 2018 dan 2019.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Metode Kuesioner, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan yang tertulis kepada pegawai untuk mengetahui informasi khusus yang berkaitan dengan pengendalian intern dalam pemberian kredit. Penulis akan menyebarkan kuesioner kepada seluruh bagian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Perbaungan Hombar Makmur.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca serta referensilainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diperlukan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian dilapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penambahan masalah sebagai dasar perbandingan praktek di lapangan.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode *champion*.

3.6.1 Metode Analisis *Champion*

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode *champion*. Metode analisis *champion* merupakan alternatif jawaban dari kuesioner dengan 2 pilihan jawaban yaitu “ya” dan “tidak”. Setelah kuesioner yang telah disebarkan kepada bagian kredit telah dijawab semua, maka hasil jawaban kuesioner yang telah disebarkan kepada bagian kredit telah dijawab semua, maka hasil jawaban kuesioner tersebut akan dihitung dengan menggunakan skala penilaian berdasarkan rumusan *champion* yang dikutip dari skripsi Amira Ahmad.

Penggunaan metode *champion* ini didukung oleh jurnal penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munawaroh dengan judul peranan pengendalian internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (studi kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri) dan Amira Ahmad dengan judul skripsi Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Mega Cabang Makassar.

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{\text{Jumlah Jawaban kuesioner}} \times 100\%$$

Presentase penelitian berdasarkan rumusan *champion*:

1. **0%-25%** = *No association or low association (weak association)*
2. **26%-50%** = *Moderately low association (moderation association)*
3. **51%-75%** = *Moderately high association (moderation strong association)*
4. **76%-100%** = *High association (strong association up to perfect association)*²⁰

Berdasarkan klasifikasi tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. 0%-25% = Pengendalian intern dalam pemberian kredit tidak efektif
2. 26%-50% = Pengendalian intern dalam pemberian kredit kurang efektif
3. 51%-75% = Pengendalian intern dalam pemberian kredit cukup efektif

²⁰Amira Ahmad, Skripsi: **Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makassar**, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hal. 40.

4. 76%-100% = Pengendalian intern dalam pemberian kredit sangat efektif